Tabel VI.1

Misi-1 : Mewujudkan Pemerintah yang kuat profesional dan transparan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	1 Mendorong Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program	1 Penyediaan layanan jaringan media partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik yang terakses selama 24 jam
		2 Pelayanan jaringan teknologi informasi di area public *(Cyber regency*)
		3 Penyediaan infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.
2 Tersedianya SDM perangkat yang berkualitas di seluruh jenjang	2 Meningkatkan kualitas SDM Perangkat Nagari	4 Meningkatkan kualitas dan sistem rekrutmen perangkat
3 Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	3 Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik	5 Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan undang-undang desa
		6 Meningkatkan Kapasitas SDM perangkat Nagari
4 Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan publik kepada masyarakat		7 Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas bagi masyarakat Nagari
5 Meningkatnya kapasitas dan akuntabiltas kinerja perangkat	4 Membentuk tim penggerak, pelaksana dan pengawal reformasi perangkat Nagari	8 Mengembangkan mekanisme kontrol/pengawasan yang aktif
6 Terbangunnya tata kelola struktur organisasi pemerintah Nagari yang sinergis sampai ke jorong	5 Mengembangkan, membina dan memberdayakan SOTK Nagari	9 Menata sitem keorganisasian Pemerintah Nagari dan Pemerintah Nagari melalui penajaman tupoksi dan kewenangan masing masing
7 Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	6 Mendorong penggunaan sistem informasi dan transaksi berbasis perbankan dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan aset Nagari	10 Peningkatan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Nagari
		11 Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional
		12 Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik
		13 Peningkatan penataan administrasi pertanahan dan aset Nagari lainnya
		14 Peningkatan manajemen kearsipan yang handal berbasis teknologi informasi
	7 Menerapkan Sistem pengawasan Internal yang terkendali	15 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		16 Rencana Aksi Nagari Pemberantasan korupsi (RANPK)
		17 Penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi
	8 Mengoptimalkan koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi perangkat dalam penyelengaraan pemerintahan	18 Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan
		19 Peningkatan sinergitas dan kejelasan kewenangan kelembagaan antar perangkat
		20 Penerapan e-government yang terintegrasi dalam mendukung tupoksi perangkat
	9 Meningkatkan kemampuan pengelolaan SDM perangkat yang kompeten dan kompetitif	21 Peningkatan kapasitas dan manajemen perangkat
		22 Penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan
		23 Penerapan sistem merit dalam pengendalian manajemen SDM perangkat
		24 Penerapan reward and punishment dalam pengukuran kinerja perangkat
		25 Penempatan perangkat yang sesuai dengan bidang keahlian
		26 Penerapan nilai-nilai integritas dalam pembentukan karakter perangkat dan revolusi mental perangkat
	10 Mendorong peningkatan kualitas perencanaan Nagari yang berbasis kerjasama serta data akurat dan akuntabel	27 Pengintegrasian data melalui pengelolaan satu data pembangunan
		28 Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas kota, pemerintahan pusat, dan kabupaten/kota dalam bidang ekonomi, social, infrastruktur dan pemerintahan
		29 Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Nagari melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri Tim Koordinasi Kerjasama antar Nagari
		30 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Nagari yang partisipatif, responsif dan aplikatif

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		31 Peningkatan sistem evaluasi dan pengawasan dalam pengendalian perencanaan pembangunan
8 Tercapainya penyediaan mutu layanan yang berbasis standar pelayanan minimal	11 Simplifikasi prosedur pelayanan publik	32 Deregulasi kebijakan Nagari yang kurang mendukung percepatan pelayanan
		33 Penerbitan Standard Operating Procedure (SOP) yang berdasarkan standar pelayanan minimal
		34 Peningkatan Infrastruktur badan layanan publik
		35 Pelayanan Administrasi Terpadu Nagari (PATEN)
9 Terwujudnya open government	12 Mendorong keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan	36 Penerapan konsultasi publik dalam setiap pembentukan kebijakan Nagari
	13 Penyediaan ruang partisipasi publik dalan menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik	37 Pengembangan sistem publikasi informatif proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik
		38 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik
	14 Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	39 Peningkatan peran serta dan fungsi partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
		40 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
		41 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
10 Tersedianya pelayanan publik *e-gov IT Based*	15 Memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang prima secara konsisten	42 Pelayanan publik yang inovatif, berbasis TI, berkualitas, cepat dan terukur
		43 Peningkatan kapasitas perangkat pengelola pelayanan publik
11 Terciptanya sistem regulasi yang mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan	16 Meningkatkan Penyediaan dan kualitas regulasi di Nagari	44 Menyusun regulasi dalam bentuk Perna dan perwana sebagai pengejawantahan kewenangan Pemerintah Nagari
12 Penguatan kapasitas monitoring dan pengawasan internal kinerja pelayanan publik	17 Mendorong implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	45 Peningkatan kapasitas perangkat pengawas kinerja badan layanan publik
		46 Peningkatan mutu pengawasan dan pelaporan kinerja layanan publik

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
13 Mewujudkan masyarakat sadar hukum melalui produk hukum Nagari	18 Mendorong penerapan sosialisasi produk hukum Nagari	47 Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penerapan produk hukum Nagari
	19 Penataan Produk Hukum Nagari	48 Menyediakan produk hukum Nagari untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		49 Peningkatan keselarasan peraturan Nagari dengan aturan yang lebih tinggi
		50 Peningkatan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik
	20 Mendorong penerapan budaya taat hukum bagi penyelenggara pemerintahan	51 Meningkatnya kesadaran hukum (legal conciuosness) dan kepatuhan hukum (legal compliance) perangkat terhadap penerapan dan penegakan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, daerah dan Nagari
		52 Membangun dan meningkatkan kapasitas serta menambah jumlah perangkat pengawas, penyuluh dan penegak hukum yang ideal didalam lingkup kerja pemerintahan
		53 Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;

Tabel VI.2

Misi-2 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya serta berbangsa dan bernegara

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan pengamalan ABS-SBK	1. Peningkatan kualitas pengamalan agama, pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan lembaga keagamaan 2. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama
2. Meningkatnya peran dan kualitas lembaga keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	2. Meningkatkan pengamalan ABS-SBK dan penerapan nilai-nilai budaya	3. Optimalisasi pengumpulan infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sumbangan lainnya untuk meningkatkan kemakmuran sosial
3. Terciptanya sistem regulasi yang mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan	3. Meningkatkan Penyediaan dan kualitas regulasi di Nagari	4. Menyusun regulasi dalam bentuk Perna dan perwana sebagai pengejawantahan kewenangan Pemerintah Nagari
4. Terlaksananya norma-norma adat dan syara` dalam kehidupan masyarakat	4. Meningkatkan pelaksanaan norma adat dan syara` dalam kehidupan masyarakat	5. Menata dan menyusun regulasi untuk mendorong penerapan norma adat dan syara` dalam kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat	5. Meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara	6. Mendorong masyarakat untuk menghargai dan mencintai bangsa dan Negara sendiri
	6. Meningkatkan penghargaan terhadap HAM	7. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap HAM
6. Meningkatnya rasa persatuan, kesatuan dan gotong royong dalam mendorong pembangunan Nagari	7. Meningkatkan kualitas SDM dalam semangat kegotongroyongan	8. Peningkatan SDM yang cerdas, berkarakter, berintegritas dengan etos kerja tinggi dalam semangat kegotoroyongan. 9. Peningkatan kualitas wawasan kebangsaan dan peringatan hari-hari besar nasional.
7. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan "*Adat Basandi Syara` dan Syara` basandi Kitabullah* " disetiap sendi masyarakat	8. Meningkatkan pengamalan ABS-SBK	10. Peningkatan kualitas pengamalan agama, pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan lembaga keagamaan.
		11. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama
8. Meningkatnya keberdayaan adat dalam mendorong pembangunan Nagari	9. Meningkatkan peranan Lembaga adat dalam pemberdayaan adat	12. Memberikan fasilitas penyusunan regulasi kepada lembaga adat guna menyusun regulasi dalam pemberdayaan adat Nagari
	10. Meningkatkan peranan Lembaga adat dan kemasyarakatan di Nagari	13. Meningkatkan peran tigo tungku sajarangan sebagai pelaku pembangunan Nagari

Tabel VI.3

Misi-3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan.

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan, saling menghormati dan menghargai	1. Menciptakan hubungan sosial yang dinamis di tengah masyarakat	1 Membangun dan menata sistem hubungan sosial yang dinamis di tengah masyarakat
2 Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat	2. Meningkatkan pengamalan ABS-SBK dan penerapan nilai-nilai budaya	2 Peningkatan kapasitas, kualitas lembaga adat, pemangku adat dalam kehidupan masyarakat serta revitalisasi nagari adat.
		3 Peningkatan peran lembaga adat dan pemangku adat dalam membasmi penyakit masyarakat dan menyaring budaya asing.
3 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional.	3. Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai budaya lokal	4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan event-event seni dan budaya
		5 Peningkatan peran lembaga seni dan budaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional.
4 Meningkatkan Akses dan Pelayanan PAUD yang berkualitas.	4. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia	6 Perluasan dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan PAUD
		7 Penguatan Lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan anak usia 3-6 tahun
		8 Pemenuhan Kualitas Pelayanan PAUD berdasarkan standar PAUD
5 Meningkatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas	5. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia	9 Menyelenggarakan Pendidikan dasar gratis bermutu dan terjangkau
		10 Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun
		11 Penguatan Kurikulum dan pelaksanaannya pada semua jenjang pendidikan
		12 Pemerataan penempatan guru pada semua jenjang
		13 Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris untuk masyarakat.
		14 Meningkatkan kualitas pembelajaran
		15 Mengembangkan pendidikan berkarakter
6 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pendidikan	6. Pemenuhan Terhadap standar pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan	16 Peningkatan ketersediaaan sarana prasarana pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan
7 Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat	7. Meningkatkan daya saing lulusan pendidikan untuk masuk perguruan tinggi/dunia usaha	17 Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan gratis bermutu dan terjangkau

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		18 Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun
		19 Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya pada semua jenjang pendidikan
		20 Pemerataan penempatan guru pada semua jenjang
		21 Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris dan komputer untuk masyarakat
		22 Meningkatkan kualitas pembelajaran
		23 Mengembangkan pendidikan berkarakter
8 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan.	8. Pelayanan Prima berhasil dan tepat guna	24 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Pustu, Polindes dan Puskesri
9 Pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (Ibu, Anak remaja dan Lanjut Usia)	9. Meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak dan lansia	25 Peningkatan kualitas pelayanan Pustu, Polindes dan Puskesri
		26 Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan dasar
		27 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau
10 Meningkatnya penyehatan lingkungan serta Pencegahan dan penanggulangan penyakit	10. 7. Meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak dan lansia	28 Peningkatan cakupan layanan dan kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan
		29 Peningkatan kewaspadaan untuk mencegah dan menanggulangi kejadian luar biasa
		30 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan bahaya narkoba
		31 Peningkatan perilaku dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
		32 Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
		33 Peningkatan ketersediaan SDM Kesehatan di Pustu, Polindes dan Puskesri
		34 Penilaian Nagari Sehat
		35 Peningkatan pembinaan terhadap penyehatan lingkungan dan sekolah
		36 Pemberian motivasi untuk mendapatkan penghargaan pada sekolah-sekolah
11 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional.	11. Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai budaya lokal	37 Peningkatan kualitas penyelenggaraan event-event seni dan budaya
		38 Peningkatan peran lembaga seni dan budaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional.

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
12 Meningkatnya sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional.	12. Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai budaya lokal	39 Peningkatan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional
13 Meningkatkan kreatifitas pemuda dan prestasi olah raga.	13. Pemberian penghargaan terhadap atlet berprestasi dan pertukaran pemuda	40 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui organisasi kepemudaan (Karang Taruna)
		41 Meningkatkan prestasi olah raga dengan memberikan kesempatan lebih besar untuk mengikuti even-even tingkat provinsi, nasional dan internasional.
14 Meningkatkan fasilitas kegiatan kepemudaan dan sarana pengembangan olahraga.	14. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana olahraga	42 Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olah raga.
15 Meningkatnya peran serta Gender dalam berbagai aspek pembangunan.	15. Penguatan pada kebijakan dan regulasi terhadap peran gender, perlindungan Anak dan Perempuan	43 Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender.
16 Terwujudnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.	16. Peningkatan terhadap pelayanan KB yang berkualitas serta peningkatan informasi tentang KB kepada masyarakat	44 Peningkatan akses dan layanan KB
		45 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan/pelaksana program KB
		46 Memperluas jejaring kerja KB terutama di tingkat Jorong
17 Menurunnya angka tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	17. Penurunan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan	47 Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak
18 Menurunnya angka kemiskinan.	18. Penurunan angka kemiskinan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat	48 Meningkatkan Pembiayaan dan Koordinasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		49 Memantapkan pelaksanaan sistim jaminan sosial.
19 Meningkatnya pelayanan pembinaan PMKS.	19. Penurunan angka kemiskinan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat	50 Meningkatkan Resosialisasi dan percaya diri PMKS
20 Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial.	20 Pembinaan terhadap anak cacat dan anak terlantar	51 Terlaksana pembinanan anak cacat dan anak terlantar
21 Meningkatnya pelayanan terhadap lansia	21. Pembinaan terhadap lansia	52 Terlaksananya pembinaan lansia

Tabel VI.4

Misi-4 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis ekonomi kerakyatan dengan pemanfaatan potensi Nagari

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan.	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan	1. Pembangunan dan rehabilitasi serta pengembangan sarana prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan
		2. Peningkatan kapasitas SDM Pertanian
		3. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
		4. Pengembangan komoditi baru dalam mendukung ketahanan pangan dan memiliki daya saing
		5. Pengembangan integrasi usaha antar sub sektor pertanian
		6. Peningkatan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
2 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan	2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan nilai tambah pertanian, perkebunan maupun perikanan	7. Peningkatan penerapan teknologi dan nilai tambah pertanian, perkebunan dan perikanan
	3. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan	8. Peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan
3 Tercapainya NAGARI MANDIRI PANGAN dan meningkatnya keamanan pangan Nagari.	4. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, diversifikasi dan mempertahankan keamanan pangan Nagari	9. Peningkatan produksi, ketersediaan dan cadangan pangan
		10. Peningkatan akses fisik dan daya beli masyarakat
		11. Peningkatan kualitas dan diversifikasi pangan
		12. Mempertahankan stabilitas pasokan dan harga pangan
		13. Peningkatan komoditi pangan segar yang aman
4 Meningkatnya pengelolaan komoditas unggulan yang berdaya saing, berdaya jual dan masuk ke pasar global	5. Meningkatkan daya tarik dan pengembangan kawasan berbasis Produk Unggulan Nagari (PUN)	14. Peningkatan daya tarik PUN, Pengembangan PU Nagari
		15. Pengembangan kawasan berbasis produk unggulan
	6. Meningkatkan promosi dan kerjasama pengelolaan PUN	16. Peningkatan promosi, investasi dan kerjasama pengelolaan PUN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	7. Meningkatkan peran stakeholders dalam pengembangan PUN	17. Peningkatan peran serta masyarakat
		18. Peningkatan perlindungan terhadap PUN
5 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	8. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata Nagari	19. Pembangunan destinasi pariwisata Nagari
	9. Meningakatkan peran stakeholders dalam pengembangan kepariwisataan	20. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan
	10. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata	21. Pembangunan pemasaran pariwisata Nagari
	11. Meningkatkan kontribusi industri pariwisata	22. Pembangunan industri pariwisata
6 Meningkatnya daya tarik investasi	12. Mempermudah perizinan dan keamanan dalam berusaha	23. Optimalisasi pelayanan perizinan dan kemudahan investasi
		24. Peningkatan promosi dan publikasi investasi
7 Meningkatnya keterampilan, kesempatan, dan perlindungan tenaga kerja.	13. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	25. Peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan pasar kerja
		26. Peningkatan akses informasi lapangan kerja dan program perluasan kesempatan kerja
		27. Pemberian bantuan usaha skala mikro untuk gerakan usaha dini mandiri
	14. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	28. Peningkatan fungsi pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
8 Berkembangnya Koperasi dan UMK (Usaha Mikro Kecil) dan BUM Nagari yang berdaya saing	15. Membangun industri unggulan Nagari	29. Pengembangan kawasan, sumber daya, teknologi industri dan peningkatan sarana prasarana industri unggulan
		30. Pemberdayaan dan Pengembangan industri kecil
	16. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perdagangan Nagari	31. Peningkatan sarana prasarana pasar
		32. Peningkatan daya saing komoditi ekspor
		33. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
	17. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan pedagang serta perlindungan konsumen	34. Penataan dan peningkatan pembinaan pedagang kakilima dan asongan serta perlindungan dan keamanan konsumen

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	18. Meningkatkan peran dan kontribusi UMK	35. Pengembangan kewirausahaan, daya saing UMK dan peningkatan IPTEK dalam sistem Industri
		36. Penciptaan iklim usaha kerakyatan melalui perwilayahan, digital ekonomi, reformasi kelembagaan
	19. Meningkatkan peran aktif koperasi melalui pembinaan dan pengawasan	37. Pembangunan dan pemberdayaan koperasi melalui permodalan, kelembagaan, SDM, teknologi, kerjasama dan kesempatan usaha
9 Mendirikan BUM Nagari	20 Meningkatkan Penyediaan dan kualitas regulasi di Nagari	38. Menyusun regulasi dalam bentuk Perna dan perwana sebagai pengejawantahan kewenangan Pemerintah Nagari
	21 Meningkatkan kinerja BUM Nagari agar lebih profesional dan berdaya saing	38. Perbaikan kinerja dan restrukturisasi BUM Nagari

Tabel VI.5

Misi-5 : Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	1. Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang dalam perencanaan dan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1 Tersusunnya regulasi dan dokumen rencana tata ruang/spasial wilayah dan kawasan pedesaan di Nagari
2 Terwujudnya percepatan pembangunan di Pusat Nagari dan Jorong	2. Percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di kawasan strategis lainnya yang berwawasan lingkungan	2 Peningkatan dan penyediaan berbagai prasarana dan sarana dasar
3 Terwujudnya mitigasi dan penangan bencana yang responsif	3. Percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di kawasan strategis lainnya yang berwawasan lingkungan	3 Optimalisasi mitigasi dan penanggulangan kejadian bencana
4 Tertanganinya kualitas infrastruktur Nagari	4. Optimalisasi Pelayanan insfrastruktur Nagari	4 Peningkatan kualitas insfrastruktur Nagari
5 Tertatanya perkembangan perumahan, permukiman dan kawasan perdagangan sesuai dengan pengembangan kawasan	5. Peningkatan penataan perumahan perkotaan/pedesaan dan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan	5 Meningkatkan fasilitas dan stimulasi penyediaan rumah sehat serta memenuhi syarat teknis bangunan bagi masyarakat melalui perbaikan rumah tak layak huni dan penyediaan perumahan oleh pemerintah maupun developer
6 Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran, dan keanekaragaman hayati	6. Penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	6 Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dalam memantau kualitas lingkungan hidup

Tabel VII.1

Misi-1 : Mewujudkan Pemerintah yang kuat profesional dan transparan

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
1 Penyediaan layanan jaringan media partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik yang terakses selama 24 jam	1 Penanganan pengaduan masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintah
2 Pelayanan jaringan teknologi informasi di area public *(Cyber regency*)	2 Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyelenggaraan Pemerintah
3 Penyediaan infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.	3 Pengembangan Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyelenggaraan Pemerintah
4 Meningkatkan kualitas dan sistem rekrutmen perangkat	4 Penataan sistem rekrutmen Perangkat	Penyelenggaraan Pemerintah
5 Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan undang-undang desa	6 Peningkatan kapasitas aparatur Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
6 Meningkatkan Kapasitas SDM perangkat Nagari	7 Peningkatan kapasitas aparatur Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
7 Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas bagi masyarakat Nagari.	8 Penanganan pengaduan masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintah
	9 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penyelenggaraan Pemerintah
	10 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penyelenggaraan Pemerintah
8 Mengembangkan mekanisme kontrol/pengawasan yang aktif	11 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
9 Menata sitem keorganisasian Pemerintah Nagari dan Pemerintah Nagari melalui penajaman tupoksi dan kewenangan masing masing	12 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
10 Peningkatan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Nagari	13 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
11 Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional	14 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Penyelenggaraan Pemerintah
	15 Pemberdayaan jasa konstruksi	Penyelenggaraan Pemerintah
12 Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik	16 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyelenggaraan Pemerintah
13 Peningkatan penataan administrasi pertanahan dan aset Nagari lainnya	17 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penyelenggaraan Pemerintah

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
	18 Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Penyelenggaraan Pemerintah
14 Peningkatan manajemen kearsipan yang handal berbasis teknologi informasi	19 Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Penyelenggaraan Pemerintah
15 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	20 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
16 Rencana Aksi Nagari Pemberantasan korupsi (RANPK)	21 Perencananaan pembangunan bidang pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintah
17 Penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi	22 Penanganan pengaduan masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintah
18 Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan	23 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
19 Peningkatan sinergitas dan kejelasan kewenangan kelembagaan antar perangkat	24 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
20 Penerapan e-government yang terintegrasi dalam mendukung tupoksi perangkat	25 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
21 Peningkatan kapasitas dan manajemen perangkat	26 Peningkatan kapasistas sumber daya aparatur	Penyelenggaraan Pemerintah
22 Penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan	27 Pembinaan dan pengembangan aparatur	Penyelenggaraan Pemerintah
23 Penerapan sistem merit dalam pengendalian manajemen SDM perangkat	28 Pembinaan dan pengembangan aparatur	Penyelenggaraan Pemerintah
24 Penerapan *reward* and *punishment* dalam pengukuran kinerja perangkat	29 Pembinaan dan pengembangan aparatur	Penyelenggaraan Pemerintah
25 Penempatan perangkat yang sesuai dengan bidang keahlian	30 Pembinaan dan pengembangan aparatur	Penyelenggaraan Pemerintah
26 Penerapan nilai-nilai integritas dalam pembentukan karakter perangkat dan revolusi mental perangkat	31 Pembinaan dan pengembangan aparatur	Penyelenggaraan Pemerintah
27 Pengintegrasian data melalui pengelolaan satu data pembangunan	32 Pengembangan Data/ Informasi	Penyelenggaraan Pemerintah
28 Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas kota, pemerintahan pusat, dan kabupaten/kota dalam bidang ekonomi, sosial, infrastruktur dan pemerintahan	33 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah	Penyelenggaraan Pemerintah
29 Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Nagari melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri Tim Koordinasi Kerjasama antar Nagari	34 Peningkatan kerjasama pembangunan	Penyelenggaraan Pemerintah

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
30 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Nagari yang partisipatif, responsif dan aplikatif	35 Perencanaan pembangunan Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
	36 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan	Penyelenggaraan Pemerintah
	37 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
31 Peningkatan sistem evaluasi dan pengawasan dalam pengendalian perencanaan pembangunan	38 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
32 Deregulasi kebijakan Nagari yang kurang mendukung percepatan pelayanan	39 Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Pemerintah
33 Penerbitan Standard Operating Procedure (SOP) yang berdasarkan standar pelayanan minimal	40 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
34 Peningkatan Infrastruktur badan layanan publik	41 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyelenggaraan Pemerintah
35 Pelayanan Administrasi Terpadu Nagari (PATEN)	42 Penataan Administrasi terpadu di Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
	43 Penataan Administrasi kependudukan	Penyelenggaraan Pemerintah
36 Penerapan konsultasi publik dalam setiap pembentukan kebijakan Nagari	44 Peningkatan pelayanan kedinasan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah
37 Pengembangan sistem publikasi informatif proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik	45 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyelenggaraan Pemerintah
38 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik	46 Penataan peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan Pemerintah
39 Peningkatan peran serta dan fungsi partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan;	47 Pendidikan Politik Masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintah
40 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	48 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan Pemerintah
41 Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara	49 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan Pemerintah
42 Pelayanan publik yang inovatif, berbasis TI, berkualitas, cepat dan terukur	50 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyelenggaraan Pemerintah
43 Peningkatan kapasitas perangkat pengelola pelayanan publik	51 Pengembangan kapasitas aparatur	Penyelenggaraan Pemerintah
44 Menyusun regulasi dalam bentuk Perna dan perwana sebagai pengejawantahan kewenangan Pemerintah Nagari	52 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
45 Peningkatan kapasitas perangkat pengawas kinerja badan layanan publik	53 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penyelenggaraan Pemerintah
46 Peningkatan mutu pengawasan dan pelaporan kinerja layanan publik	54 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penyelenggaraan Pemerintah
47 Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penerapan produk hukum Nagari	55 Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Pemerintah
	56 Pemeliharaan trantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penyelenggaraan Pemerintah
	57 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintah
48 Menyediakan produk hukum Nagari untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	58 Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Pemerintah
49 Peningkatan keselarasan peraturan Nagari dengan aturan yang lebih tinggi	59 Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Pemerintah
50 Peningkatan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik	60 Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Pemerintah
51 Meningkatnya kesadaran hukum (*legal conciuosness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*) perangkat terhadap penerapan dan penegakan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, daerah dan Nagari	61 Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Pemerintah
52 Membangun dan meningkatkan kapasitas serta menambah jumlah aparatur pengawas, penyuluh dan penegak hukum yang ideal didalam lingkup kerja pemerintahan	62 Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Pemerintah
53 Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;	63 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Wali Nagari	Penyelenggaraan Pemerintah

Tabel VII.2

Misi-2 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya serta berbangsa dan bernegara

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
1 Peningkatan kualitas pengamalan agama, pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan lembaga keagamaan	1 Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat	
2 Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	2 Pembinaan keagamaan masyarakat	
3 Optimalisasi pengumpulan infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sumbangan lainnya untuk meningkatkan kemakmuran sosial	3 Pembinaan keagamaan masyarakat	
4 Menyusun regulasi dalam bentuk Perna dan perwana sebagai pengejawantahan kewenangan Pemerintah Nagari	4 Penataan Peraturan Perundang-undangan	
5 Menata dan menyusun regulasi untuk mendorong penerapan norma adat dan syara` dalam kehidupan masyarakat	5 Penataan Peraturan Perundang-undangan	
6 Mendorong masyarakat untuk menghargai dan mencintai bangsa dan Negara sendiri	6 Pengembangan wawasan kebangsaan	
7 Meningkatkan pemahaman masryarakat terhadap HAM	7 Pengembangan wawasan kebangsaan	
8 Peningkatan SDM yang cerdas, berkarakter, berintegritas dengan etos kerja tinggi dalam semangat kegotoroyongan.	8 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	9 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Nagari	
9 Peningkatan kualitas wawasan kebangsaan dan peringatan hari-hari besar nasional.	10 Pengembangan wawasan kebangsaan	
10 Peningkatan kualitas pengamalan agama, pelestarian adat dan budaya serta pemberdayaan lembaga keagamaan.	11 Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat	
11 Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	12 Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat	
12 Memberikan fasilitas penyusunan regulasi kepada lembaga adat guna menyusun regulasi dalam pemberdayaan adat Nagari	13 Pengembangan kapasitas pemangku adat	
13 Meningkatkan peran tigo tungku sajarangan sebagai pelaku pembangunan Nagari	14 Pengembangan kapasitas pemangku adat	

Tabel VII.3

Misi-3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
1 Membangun dan menata sistem hubungan sosial yang dinamis di tengah masyarakat	1 Pengembangan kapasitas lembaga Nagari	
2 Peningkatan kapasitas, kualitas lembaga adat, pemangku adat dalam kehidupan masyarakat serta revitalisasi nagari adat	2 Pengembangan kapasitas pemangku adat	
3 Peningkatan peran lembaga adat dan pemangku adat dalam membasmi penyakit masyarakat dan menyaring budaya asing	3 Pengembangan kapasitas pemangku adat	
4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan event-event seni dan budaya	4 Pengelolaan Keragaman Budaya	
5 Peningkatan peran lembaga seni dan budaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional.	5 Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarkatan	
6 Perluasan dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan PAUD	6 Pendidikan Anak Usia Dini	
7 Penguatan Lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan anak usia 3-6 tahun	7 Pendidikan Anak Usia Dini	
8 Pemenuhan Kualitas Pelayanan PAUD berdasarkan standar PAUD	8 Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
9 Menyelenggarakan Pendidikan dasar gratis bermutu dan terjangkau	9 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
10 Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun	10 Pendidikan Non Formal	
11 Penguatan Kurikulum dan pelaksanaannya pada semua jenjang pendidikan	11 Pendidikan Anak Usia Dini	
	12 Wajib Belajar Pendidikan Dasar	
	13 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
12 Pemerataan penempatan guru pada semua jenjang	14 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Manajemen Pelayanan pendidikan	
13 Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris untuk masyarakat	15 Pendidikan Non Formal	
14 Meningkatkan kualitas pembelajaran	16 Manajemen Pelayanan Pendidikan	
15 Mengembangkan pendidikan berkarakter	17 Pendidikan Anak Usia Dini	
	18 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
16 Peningkatan ketersediaaan sarana prasarana pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	19 Pendidikan Anak Usia Dini	
17 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan gratis bermutu dan terjangkau	20 Taman Bacaan Masyarakat	
	21 Kegiatan Belajar Masyarakat	
18 Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun	21 Pendidikan Formal	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
19 Penguatan Kurikulum dan pelaksanaannya pada semua jenjang pendidikan	22 Pendidikan Anak Usia Dini	
	23 Wajib Belajar Pendidikan Dasar	
20 Pemerataan penempatan guru pada semua jenjang	24 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Manajemen Pelayanan pendidikan	
21 Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris dan komputer untuk masyarakat	25 Pendidikan Formal	
22 Meningkatkan kualitas pembelajaran	26 Manajemen Pelayanan Pendidikan	
23 Mengembangkan pendidikan berkarakter	27 Pendidikan Anak Usia Dini	
24 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Pustu, Polindes dan Puskesri	28 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu, dan jaringannya	
	29 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya	
	30 Program pembinaan Lingkungan Sosial	
	31 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana RS/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	
	32 Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
	33 Obat dan Perbekalan Kesehatan	
	34 Pengawasan obat dan makanan	
25 Peningkatan kualitas pelayanan Pustu, Polindes dan Puskesri	35 Upaya Kesehatan Masyarakat	
	36 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	
26 Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan dasar	37 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
	38 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	
	39 Perbaikan Gizi Masyarakat	
27 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau	40 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
	41 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
28 Peningkatan cakupan layanan dan kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan	42 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
29 Peningkatan kewaspadaan untuk mencegah dan menanggulangi kejadian luar biasa	43 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
30 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan bahaya narkoba	44 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
31 Peningkatan perilaku dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	45 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	
32 Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	46 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	
33 Peningkatan ketersediaan SDM Kesehatan di Pustu, Polindes dan puskesri	47 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
34 Penilaian Nagari Sehat	48 Pengembangan Lingkungan Sehat	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
35 Peningkatan pembinaan terhadap penyehatan lingkungan dan sekolah	49 Pengembangan Lingkungan Sehat	
36 Pemberian motivasi untuk mendapatkan penghargaan pada sekolah-sekolah	50 Pengembangan Lingkungan Sehat	
37 Peningkatan kualitas penyelenggaraan event-event seni dan budaya	51 Pengelolaan Keragaman Budaya	
38 Peningkatan peran lembaga seni dan budaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional.	52 Pengembangan nilai budaya	
39 Peningkatan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional	53 Pengembangan nilai budaya	
40 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui organisasi kepemudaan (Karang Taruna)	54 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	
	55 Peningkatan peran serta kepemudaan	
	56 Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	
41 Meningkatkan prestasi olah raga dengan memberikan kesempatan lebih besar untuk mengikuti even-even tingkat	57 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	
	58 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
42 Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olah raga.	59 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	
43 Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender.	60 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	61 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	62 Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	
44 Peningkatan akses dan layanan KB	63 Keluarga Berencana	
	64 Pelayanan kontrasepsi	
45 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan /pelaksana program KB	65 pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	
	66 promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	
	67 Kesehatan Reproduksi Remaja	
	68 Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	
46 Memperluas jejaring kerja KB terutama di tingkat Jorong	69 Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	
	70 Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	
	71 Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
47 Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak	72 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
	73 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	
	74 Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
48 Meningkatkan Pembiayaan dan Koordinasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	75 Program pada seluruh Perangkat yang mendukung penaggulangan kemiskinan	
49 Memantapkan pelaksanaan sistim jaminan sosial.	76 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
50 Meningkatkan Resosialisasi dan percaya diri PMKS	77 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
51 Terlaksana pembinanan anak cacat dan anak terlantar	78 pembinaan anak terlantar	
	79 pembinaan para penyandang cacat dan trauma	
52 Terlaksananya pembinaan lansia	80 pembinaan panti asuhan/ panti jompo	
	81 pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
	82 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	

Tabel VII.4

Misi-4 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis ekonomi kerakyatan dengan pemanfaatan potensi Nagari

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
1. Pembangunan dan rehabilitasi serta pengembangan sarana prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan	1 Optimalisasi pengelolaan sarana pertanian perkebunanan dan perikanan	
2. Peningkatan kapasitas SDM Pertanian	2 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	
3. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	3 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
4. Pengembangan komoditi baru dalam mendukung ketahanan pangan dan memiliki daya saing	4 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
5. Pengembangan integrasi usaha antar sub sektor pertanian	5 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
	6 Pengembangan budidaya perikanan	
6. Peningkatan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	7 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
7. Peningkatan penerapan teknologi dan nilai tambah pertanian, perkebunan dan perikanan	8 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	
	9 Peningkatan penerapan teknologi peternakan	
	10 Peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan	
8. Peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan	11 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
	12 Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan	
	13 Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	
9. Peningkatan produksi, ketersediaan dan cadangan pangan	14 Perencanaan pembangunan ekonomi	
	15 Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	
	16 Peningkatan kesejahteraan Petani	
	17 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
	18 Peningkatan produksi hasi peternakan	
	19 Pengembangan budidaya perikanan	
10. Peningkatan akses fisik dan daya beli masyarakat	20 Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan	
	21 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMK	
	22 Pembangunan Jalan dan Jembatan	
	23 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
	24 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
11. Peningkatan kualitas dan diversifikasi pangan	25 Peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan	
12. Mempertahankan stabilitas pasokan dan harga pangan	26 Peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan	
13. Peningkatan komoditi pangan segar yang aman	27 Peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan	
14. Peningkatan daya tarik PUN, Pengembangan PU Nagari	28 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	
	29 Perencanaan pembangunan ekonomi	
	30 Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	
	31 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
	32 Pengembagan budidaya perikanan	
	33 Penigkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
15. Pengembangan kawasan berbasis produk unggulan	34 Pengembangan Industri kecil dan Menengah	
	35 Peningkatan dan Pengembangan ekspor	
	36 Pembangunan jalan dan jembatan	
	37 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
	38 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi	
	39 Pengembangan Kinerja pengelolaan sampah	
16. Peningkatan promosi, investasi dan kerjasama pengelolaan Produk Unggulan Nagari (PUN)	40 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	
	41 Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
	42 Kerjasama Pembangunan	
17. Peningkatan peran serta masyarakat	43 Peningkatan Poduksi Pertanian Perekbunan	
	44 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
	45 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
	46 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	
	47 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	
18. Peningkatan perlindungan terhadap PUN	48 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	
19. Pembangunan destinasi pariwisata Nagari	49 Pembangunan Destinasi Pariwisata	
	50 Peningkatan jalan dan jembatan	
	51 Pengembangan Destinasi Pariwisata	
	52 Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	
	53 Pengembangan Kemitraan	
	54 Pengembangan Pemasaran wisata	
20. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan	55 Pengembangan kemitraan	
	56 Pengemabngan Pemasaran Pariwisata	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
21. Pembangunan pemasaran pariwisata Nagari	57 Pengembangan pemasaran pariwisata	
22. Pembangunan industri pariwisata	58 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	
	59 Pengembangan kewisarusahaan dan keunggulan komptitif usaha kecil menengah	
	60 Pengembangan Industri Kecil dan menengah	
	61 Pengembangann Destinasi Wisata	
23. Optimalisasi pelayanan perizinan dan kemudahan investasi	62 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
	63 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
24. Peningkatan promosi dan publikasi investasi	64 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
	65 Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana Nagari	
25. Peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan pasar kerja	66 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	
26. Peningkatan akses informasi lapangan kerja dan program perluasan kesempatan kerja	67 Peningkatan kesempatan kerja	
27. Pemberian bantuan usaha skala mikro untuk gerakan usaha dini mandiri	68 Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemud	
28. Peningkatan fungsi pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja	69 Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	
29. Pengembangan kawasan, sumber daya, teknologi industri dan peningkatan sarana prasarana industri unggulan	70 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
	71 Pengembangan sentra-sentra industri potensial	
	72 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
	73 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produk	
	74 Penataan Struktur Industri	
	75 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
	76 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
	77 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	
	78 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	
	79 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
	80 Pembangunan jalan dan jembatan	
	81 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembat	
	82 Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
30. Pemberdayaan dan Pengembangan industri kecil	83 Pengembangan industri kecil dan menengah	
31. Peningkatan sarana prasarana pasar	84 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
	85 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	
	86 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
	87 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	
32. Peningkatan daya saing komoditi ekspor	88 Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	
	89 Meningkatan dan Pengembangan Ekspor	
33. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	90 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	
34. Penataan dan peningkatan pembinaan pedagang kakilima dan asongan serta perlindungan dan keamanan konsumen	91 Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	
	92 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdangan	
35. Pengembangan kewirausahaan, daya saing UMK dan peningkatan IPTEK dalam sistem Industri	93 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	94 peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	
36. Penciptaan iklim usaha kerakyatan melalui perwilayahan, digital ekonomi, reformasi kelembagaan	95 Pengembangan sentra-sentra industri potensial	
	96 penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	
	97 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
37. Pembangunan dan pemberdayaan koperasi melalui permodalan, kelembagaan, SDM, teknologi, kerjasama dan kesempatan usaha	98 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	99 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
38. Menyusun regulasi dalam bentuk Perna dan perwana sebagai pengejawantahan kewenangan Pemerintah Nagari	100 Penataan Peraturan Perundang-undangan	
38. Perbaikan kinerja dan restrukturisasi BUM Nagari	101 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
	102 Peningkatan kinerja dan daya saing BUM Nagari	

Tabel VII.5

Misi-5 : Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
1. Tersusunnya regulasi dan dokumen rencana tata ruang/spasial wilayah dan kawasan pedesaan di Nagari	1 Perencanaan Tata Ruang	Penyelenggaraan Pemerintah
	2 Pemanfaatan Ruang	Penyelenggaraan Pemerintah
	3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyelenggaraan Pemerintah
2. Peningkatan dan penyediaan berbagai prasarana dan sarana dasar	4 Pengembangan wilayah perbatasan	Pelaksanaan Pembangunan
	5 Perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	Pelaksanaan Pembangunan
	6 Perencanaan pengembangan kawasan usaha menengah dan besar	Pelaksanaan Pembangunan
3. Optimalisasi mitigasi dan penanggulangan kejadian bencana	7 Perencanaan prasarana kawasan & Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Pembangunan
	8 Perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	Pelaksanaan Pembangunan
	9 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Pelaksanaan Pembangunan
	10 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pelaksanaan Pembangunan
4. Peningkatan kualitas insfrastruktur Nagari	11 Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pelaksanaan Pembangunan
	12 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pelaksanaan Pembangunan
	13 Pembangunan turap/talud/ bronjong	Pelaksanaan Pembangunan
	14 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pelaksanaan Pembangunan
	15 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Pelaksanaan Pembangunan
	16 Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Pelaksanaan Pembangunan
	17 Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Pelaksanaan Pembangunan
	18 Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Pelaksanaan Pembangunan
	19 Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pelaksanaan Pembangunan
	20 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pelaksanaan Pembangunan
	21 Penyediaan dan pengolahan air baku	Pelaksanaan Pembangunan
	22 Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Pelaksanaan Pembangunan
	23 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pelaksanaan Pembangunan
	24 Pengendalian banjir	Pelaksanaan Pembangunan
	25 Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pelaksanaan Pembangunan
	26 Pembangunan infrastruktur perdesaaan	Pelaksanaan Pembangunan
	27 Pengendalian banjir	Pelaksanaan Pembangunan
	28 Lingkungan Sehat Perumahan	Pelaksanaan Pembangunan
5. Meningkatkan fasilitas dan stimulasi penyediaan rumah sehat serta memenuhi syarat teknis bangunan bagi masyarakat melalui perbaikan rumah tak layak huni dan penyediaan perumahan oleh pemerintah maupun developer	29 Pengembangan Perumahan	Pelaksanaan Pembangunan
	30 Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Pelaksanaan Pembangunan
	31 Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Pelaksanaan Pembangunan
6. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dalam memantau kualitas lingkungan hidup	32 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pelaksanaan Pembangunan
	33 Pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup	Pelaksanaan Pembangunan
	34 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Pembangunan
	35 Rehabilitasi & pemulihan cadangan Sumber daya alam	Pelaksanaan Pembangunan

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN / BIDANG
	36 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Pembangunan
	37 Peningkatan Pengendalian Polusi	Pelaksanaan Pembangunan
	38 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Pelaksanaan Pembangunan
	39 Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pelaksanaan Pembangunan